

ANALISIS PERSPEKTIF MAHASISWA DALAM MENYIKAPI ISU SARA MENJELANG PILPRES 2019

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2019, 8(1): 18-34

M Khoiruzadid Taqwa¹, Riki Purwanto¹, Yoga Putra A.¹, Yonanda Sukma W.¹, Nadia Tresna Raisya², Wahyu Dewi Fatmala², Nur Hidayah³, Rosseta Septia Menawati³, Khalis Asyifani³

Abstract

This descriptive qualitative research was conducted in Universitas Sebelas Maret (Sebelas Maret University) (thereafter called UNS) on August-October 2018. The objective of research was to find out type and form of racial, ethnic, and religious issues, UNS students' perspective and attempt to treat racial, ethnic, and religious issues developing around the Presidential Election of 2019, and the expectation to the implementation of 2019 General Election. The informant of research consisted of students coming from various generations, study programs or departments, and faculties in Universitas Sebelas Maret. Data validation was derived from 2 informants: IA and S as the political observers from FISIP UNS. Data were collected through observation, in-depth interview, and relevant document. Data analysis was conducted using an interactive model of analysis encompassing data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing with Gaunt and Ollenburger's political issue theory. The result of research showed that racial, ethnic, and religious issues developing around the Presidential Election of 2019 involved religious issue, as could be seen in social media and other media. As the agent of change, the students viewed that the public should unnecessarily respond to the unhealthy issues that could result in dissension within society, but they should manifest it into idea and solution. Media should not be partial to one of candidates, and there should be no money politics in Presidential Election of 2019 that could increase the opportunity of corruption. To solve it, socialization and education should be given to society, youth, and students about general election and legislatives should socialize actively about hoax and decline the distribution of unhealthy issue.

Keywords: Racial, Ethnic, and Religious Issues, Presidential Election, Student's Attitude.

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret

² Program Studi D-3 Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret

³ Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret

^{1,2,3} Peneliti Center of Social and Politic Research (CENSOR) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan di Universitas Sebelas Maret pada Agustus-Oktober 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis, bentuk isu SARA, perspektif dan upaya mahasiswa UNS dalam menyikapi isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019, serta harapannya terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Informan penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai angkatan, program studi dan fakultas di Universitas Sebelas Maret. Adapun untuk validasi data diperoleh dari 2 narasumber, yaitu IA dan S selaku pengamat politik dari FISIP UNS. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumen terkait. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan teori isu politik dari Gaunt dan Ollenburger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019 yaitu isu agama, yang diketahui dari media sosial dan media lainnya. Sebagai agen perubahan, mahasiswa berpandangan bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu menanggapi isu-isu yang tidak sehat dan dapat membuat perpecahan masyarakat, namun mewujudkannya dalam ide dan solusi. Media hendaknya tidak memihak salah satu calon, serta tidak ada *money politic* dalam Pilpres 2019 yang dapat menyebabkan peluang korupsi semakin besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pemuda dan mahasiswa tentang seputar pemilihan umum, legislatif harus lebih aktif, pencerdasan mengenai *hoax* dan menolak penyebaran isu yang tidak sehat.

Kata kunci : Isu SARA, Pilpres, Sikap Mahasiswa.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu perkembangan sekaligus pilihan dari sistem politik yang di gunakan dalam suatu negara. Dalam paradigma sosiologi hal ini merupakan fase dari sistem politik sebelumnya yang dicapai melalui suatu proses interaksi dan perubahan. Pelaksanaan pemilihan umum salah satunya. Pemilihan umum di Indonesia biasanya menggunakan sistem mencoblos atau mencontreng (Bakhri, 2013).

Pemilihan umum merupakan sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut asas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain memilih anggota legislatif, pemilu juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu menentukan masa depan suatu bangsa. Dalam pelaksanaannya terdapat asas yang memuat prinsip pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil. Meski dasar-dasar pelaksanaan Pemilu terdapat dalam undang – undang, namun banyak terjadi penyimpangan, misalnya suap bagi para calon pemilih. Tahapan Pemilu diawali dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; lalu pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Masa kampanye merupakan tahapan yang paling heboh dengan banyaknya poster, spanduk, kumpulan massa dan bahkan arak-arakan di jalan. Tujuan kampanye adalah untuk memperkenalkan visi, misi dan program partai atau calon kepada rakyat kalau mereka terpilih sebagai wakil rakyat. Adapun masa tenang adalah masa antara berakhirnya kampanye dan pemungutan suara; lalu pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu, dan terakhir pengucapan sumpah/janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 diharapkan aman dan damai, namun fenomena yang terjadi banyak isu-isu yang berkembang. Sebuah isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktek korporat dengan harapan *stakeholders*-nya.

Sebuah isu yang timbul ke permukaan adalah suatu kondisi atau peristiwa, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang jika dibiarkan akan

mempunyai efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi atau target-target organisasi dimasa mendatang (Regester and Larkin, 2008). Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat, terjadinya peristiwa dramatis, perubahan sosial, dan kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Berdasarkan sumber isu dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Isu-isu internal, yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi. Biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi. Isu-isu eksternal, yaitu mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. (Gaunt dan Ollenburger, 1995)

Ada dua aspek jenis isu, yaitu *defensive issues* dan *offensive issues*. *Defensive issues* adalah isu-isu yang membuat cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi, karenanya organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. *Offensive issues* adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. (Harrison, 2000). Sedang dari aspek keluasan isu ada 4 (empat) jenis isu. Isu-isu universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih *immanent*. Isu-isu advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak orang seperti pada isu universal. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi kepentingan publik. Isu ini bersifat potensial. Isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja yang terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih memperhatikan isi ini. Isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang diantara para pakar (Kriyantono, 2012). Isu sering berubah menjadi krisis melalui beberapa tahap, yaitu origin (*potential stage*); *mediation dan amplification*. (*immiment stage / emerging*); *organization (current stage dan critical stage)*; *resolution (dormant stage)* (Crabbe and Vibbert, 1985; Gaunt and Ollenburger, 1995).

Isu Suku, Ras, Agama, dan antar Golongan (SARA) sering diangkat menjadi isu krusial dalam Pilpres. Suku bangsa merupakan kelompok sosial

atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri (Koentjaraningrat, 1986). Kelompok etnik adalah suatu kelompok sosial yang memiliki tradisi kebudayaan dan rasa identitas yang sama sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang lebih besar (Theodorson and Theodorson, 1979). Kelompok etnik adalah suatu kesatuan orang-orang yang secara bersama-sama menjalani pola-pola tingkah laku normatif, atau kebudayaan, dan yang membentuk suatu bagian dari populasi yang lebih besar, saling berinteraksi dalam kerangka suatu sistem sosial bersama, seperti negara. Jadi suku bangsa adalah kesatuan hidup manusia yang memiliki kebudayaan dan tradisi yang unik, membuat mereka mereka memiliki identitas khusus dan berbeda dengan kelompok lainnya, dan suku bangsa merupakan bagian dari populasi yang lebih besar yang disebut dengan bangsa (Cohen, 1974).

Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang didalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respons emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Clifford Geertz (1974, 1981) mengistilahkan agama sebagai sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dari dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realistis. Kata “ras” berasal dari bahasa Prancis-Italia “*razza*” yang artinya perbedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik (bentuk dan warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk mata, dan bentuk tubuh. Umumnya ras dibagi menjadi 3: Mongoloid, Kaukasian dan Negroid. Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis, bukan berdasarkan ciri-ciri sosiokultural. Dengan

kata lain, ras berarti golongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk daerah lain (Kroeber, 1948). Max Weber menyatakan bahwa golongan adalah suatu kumpulan manusia dalam satu wadah kemasyarakatan.

Jadi SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori. Kategori individual merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan. Kategori institusional merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. Kategori kultural merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat

Pilpres tahun 2019 dikhawatirkan akan tercoreng oleh maraknya ujaran kebencian dan isu SARA. Hal itu terjadi karena ada sebagian orang yang memanfaatkan ujaran kebencian dan isu SARA sebagai salah satu model kampanye hitam untuk menyerang lawan politiknya. Isu tersebut akan digunakan berbagai pihak untuk mengusung diri maupun menjatuhkan pihak lain, baik secara konvensional maupun melalui media sosial. Isu SARA berpotensi menjadi salah satu bahan kampanye dalam Pilpres tahun 2019 yang akan datang. Isu SARA yang sering kali digunakan dalam kontes politik lebih kepada mengasosiasikan sosok tertentu dengan fakta yang tidak sebenarnya, dan sejauh asosiasi itu dibuat tidak jarang hanya karena berbeda kepercayaan, seorang calon disebut sebagai orang yang tidak beragama. Mereka tidak peduli dampak negatif dari ujaran kebencian yang disebarinya terhadap publik. Publik menjadi terpecah dan rentan bermusuhan. Peran partai politik sangat besar untuk mengantisipasi.

Berkaca pada kasus yang terjadi pada Pilkada DKI 2017, isu penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok dinilai efektif untuk menurunkan jumlah pendukungnya. Isu tersebut mampu memobilisasi massa Islam untuk melakukan Aksi Bela Islam. Aksi itu tidak hanya berlangsung di DKI saja, namun telah menjadi isu nasional yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menunjukkan bahwa isu SARA menjadi isu sensitif yang potensial untuk menjatuhkan lawan dan memecah belah bangsa. Isu agama rawan ditunggangi dengan kepentingan politik tertentu, oleh karena itu sebagai generasi muda harus mampu menerima informasi secara lebih selektif terhadap informasi yang didapatkan, tidak semua informasi yang diterima merupakan fakta yang sebenarnya. Informasi yang diterima adalah isu yang disebarkan oleh kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. Peran perspektif pemuda termasuk mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam menyikapi isu SARA sangat dibutuhkan, dan saat ini Indonesia menghadapi Pilpres 2019.

Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di Perguruan Tinggi dengan batas usia sekitar 18 – 30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan Perguruan Tinggi. Mahasiswa merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat (Sarwono, 1978).

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2018) mengenai Hiperealitas Endorse di kalangan mahasiswa UNS, (1) “Endorse” dapat menunjukkan eksistensi mahasiswa, buktinya adalah mahasiswa yang berlomba – lomba untuk mendapatkan banyak “endorse”. Sehingga semakin banyak “endorse” yang didapatkan oleh mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan makin populer; (2) “endorse” tidak hanya dapat menunjukkan eksistensi dari mahasiswa, namun “endorse” juga dapat mempengaruhi pola perilaku dari mahasiswa. Hal ini terlihat dari variasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengorganisasi grup promosi, selalu memposting *post* aktivitas yang bersifat promosi dalam instagram mereka, melakukan rekrutmen organisasi. Sehingga “endorse” tersebut membuat mahasiswa memiliki “*wasting post*” dalam instagram mereka.

Peran dan fungsi mahasiswa, dapat sebagai *iron stock*; *agent of change*; *social control*; *moral force* dan *guardian of value*. Hal ini karena mahasiswa memiliki kemampuan dan juga kesempatan untuk belajar di Perguruan Tinggi, sehingga dapat digolongkan dalam golongan intelegensia. Dengan memiliki kesempatan yang ada, mahasiswa diharapkan kelak bisa bertindak sebagai pemimpin yang mampu serta terampil, baik sebagai pemimpin masyarakat maupun dalam dunia kerja nantinya; dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat (Kartono, 1985; Kahan and Rapoport, 1997; Ulfah, 2010). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis, bentuk dari isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019, perspektif dan upaya mahasiswa UNS terhadap isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019, serta harapan mahasiswa terhadap pelaksanaan Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan di Universitas Sebelas Maret pada Agustus-Oktober 2018. Sebagai informan utama adalah mahasiswa dari berbagai angkatan, program studi dan fakultas di Universitas Sebelas Maret yang terdiri dari 20 informan, yaitu 4 informan dari FISIP (A1,A2,A3, dan A4), 2 informan dari FK (B1 dan B2), 3 informan dari FH (C1,C2, dan C3), 3 informan dari FEB (D1,D2, dan D3), 3 informan dari FKIP (E1,E2, dan E3), 3 informan dari FP (F1, F2, dan F3), serta 2 informan dari FT (G1 dan G2). Adapun untuk validasi data diperoleh dari 2 narasumber yaitu IA dan S pengamat politik dari FISIP UNS. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumen terkait. Setelah dilakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik analisis datanya adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut (Surachman dalam Bakhri, 2018). Teknik analisis data dengan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sutopo, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Isu SARA menjelang Pilpres 2019

Pada umumnya mahasiswa UNS berpendapat bahwa :

“Keadaan politik Indonesia saat ini banyak hal yang memicu perpecahan. Misal, sewaktu Presiden Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden dengan wakilnya yang belum pasti kemudian juga kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok”

Menurut IA dan S bahwa :

“Keadaan politik Indonesia menjelang Pilpres 2019 diwarnai dengan berbagai tindak provokasi. Provokasi tersebut tentu saja akan menimbulkan perpecahan pada lapisan masyarakat. Seperti halnya saat Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden 2019, akan tetapi belum menentukan wakil yang akan dipinangnya. Hal tersebut menimbulkan dua kubu dalam masyarakat yang mendukung Wakil A dan Wakil B. Kelompok masyarakat yang memiliki paham yang sama akan mendukung salah satu calon. Namun sayangnya, dukungan terhadap calon tersebut seringkali dinilai berlebihan hingga menjatuhkan calon yang lainnya. Selain itu, tindak pelecehan agama oleh Ahok yang ramai diperbincangkan publik hingga digelarnya Aksi 212. Dalam kasus ini, masyarakat terpecah belah dan saling menyudutkan.”

Perspektif mahasiswa terkait dengan isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019.

A4 dan D3 berpendapat bahwa :

“Kampanye yang dilakukan selama ini di Indonesia sendiri dirasa masih belum sehat. Karena masih terdapat tindakan – tindakan penyelewengan yang terjadi, banyaknya konten yang mendorong masyarakat menjadi terpecah. Konten yang dimuat banyak yang mengandung unsur SARA. Kecanggihan sosial media pun dimanfaatkan mengingat suatu kabar saja dapat tersebar

dengan cepat. Bermunculan tagar #DiaSibukKerja oleh pendukung Jokowi, serta tagar #2019GantiPresiden oleh pendukung Prabowo.
“

C1 dan F1 menambahkan bahwa :

“Tidak jauh dari tagar-tagar tersebut muncul pula istilah cebong dan kampret yang bahkan mengisi kolom komentar akun yang berbau politik. Bahkan di akun pribadi Presiden Jokowi. Banyak munculnya beberapa kabar-kabar tidak benar berkaitan dengan salah satu calon langsung ditanggapi dan menyebar dengan luas dikalangan masyarakat dengan berbagai versi.”

Sementara itu, A1, C2, D2, E1, F3 dan G2 berpendapat bahwa :

“Untuk urusan kampanye, di Indonesia masih kurang sehat. Contohnya saja menjelang Pilpres 2019 ini banyak bertebaran hashtag dimana-mana yang kesannya memprovokasi.”

A2, A3, B1, B2, C3, D1, E2, E3, F2, dan G1 menyatakan bahwa :

“Dalam memilih calon biasanya dilihat dari latar belakangnya, baik itu prestasinya maupun program yang telah dijalankan.”

Menurut S bahwa :

“Mahasiswa dalam memilih calon biasanya melihat dari berbagai aspek calon tersebut antara lain latar belakang dan track record calon yang akan dipilih. Apabila latar belakang baik dan program-program kerja yang berjalan sesuai dengan tujuan maka akan menambah kepercayaan mahasiswa untuk memilih calon tersebut, dengan harapan bisa memajukan dan memperbaiki tatanan negara yang masih belum maksimal. Sedangkan bila memilih calon berdasarkan suatu golongan tertentu dikhawatirkan seseorang yang terpilih nantinya tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan kedudukannya.”

Sedangkan IA berpendapat bahwa :

“Di era sekarang ini banyak kalangan nonpolitik yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Sebagian dari mereka bahkan tidak mengerti mengenai politik, hanya saja diusung oleh partai, seperti artis ibu kota yang mempunyai banyak penggemar yang diharapkan akan memilihnya. Nantinya bila mereka terpilih akan terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan dengan kedudukan yang dimiliki sehingga perannya tidak dijalankan dengan baik. Selain itu tentunya dapat menimbulkan perpecahan diberbagai lapisan masyarakat.”

Upaya mahasiswa dalam menyikapi isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019.

Menurut A1, A3, B1, C2, D1, E2, E3, F2 dan G1 bahwa :

”Di lingkungan sekitar ada beberapa anggota masyarakat yang termakan kata – kata yang menimbulkan perpecahan, tapi perpecahan itu sendiri kembali lagi ke pribadi masing – masing dalam menyikapinya. Akan lebih baik bila info itu dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya.”

Sementara itu, A2, A4, B2, C3, D2, E1, F3 dan G2 menyatakan bahwa :

“Dengan berbagai bentuk kampanye saat ini yang menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan lawan salah satunya yaitu dengan mengangkat isu – isu SARA. Kita tahu bahwasannya negara Indonesia merupakan negara yang beragam, banyak terdapat perbedaan kebudayaan, kebiasaan, suku, ras dan lain-lain. Hal ini juga mempengaruhi pola pikir mereka yang berbeda dari satu individu dengan individu yang lain sehingga perpecahan ini bisa terjadi diakibatkan perbedaan perspektif dan pandangan individu tentang isu – isu yang ada dan disebar.”

Menurut IA dan S bahwa :

“Masyarakat saat ini cenderung tidak berpikir panjang dalam menyikapi kabar yang tersebar sehingga hal ini merupakan salah satu sebab perpecahan. Masyarakat terlalu dibutakan oleh pikirannya sendiri melalui kefanatikannya sehingga logika, kekritisian tidak digunakan untuk berpikir mengenai segala bentuk informasi yang belum jelas kebenarannya. Perilaku ini sangat penting untuk dibiasakan dalam diri masyarakat.”

Harapan mahasiswa dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

Demi pelaksanaan Pilpres 2019 yang aman dan damai, mahasiswa Universitas Sebelas Maret berharap :

“Untuk Pilpres 2019 ini diharapkan lebih sehat, dan sesuai dengan asas – asas pemilu yang ada, tidak mengangakat isu – isu yang berdampak pada ketenangan masyarakat pada umumnya, dan dibutuhkan sikap selektif dan berpendirian teguh.”

Masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang merasa kebingungan dalam memilih calon pemimpin yang benar – benar mereka butuhkan. Banyak dari mereka memilih calon pemimpin hanya karena termakan perkataan orang luar dan terpengaruh oleh janji – janji yang dijabarkan ketika kampanye. Penyalahgunaan isu – isu SARA ini malah dianggap akan membuat masyarakat akan lebih tidak selektif dalam memilih calon pemimpin yang benar. Hal ini diungkapkan oleh mahasiswa UNS.

Oleh karena itu, sikap selektif dan cermat bagi masyarakat harus ditumbuhkan agar dalam pelaksanaan Pilpres 2019 ini bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Namun pada kenyataannya sikap selektif dalam masyarakat ini cenderung rendah, sehingga sosialisasi tentang pentingnya bersikap selektif dan cermat dalam memilih calon pemimpin penting dilakukan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

Pembahasan

Tahun politik seperti sekarang ini, banyak sekali informasi-informasi mengenai politik yang mengarah kepada isu SARA. Isu SARA yang kental di Indonesia adalah mengenai agama, seperti contoh kasus yang sudah ada, mereka calon politikus maupun orang-orang disekitarnya berusaha menjatuhkan lawan politiknya dengan menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya dengan menggunakan isu SARA sebagai bumbunya. Bahkan banyaknya isu-isu SARA yang muncul, hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi baik masyarakat, civitas akademika, seperti mahasiswa maupun elit politik Indonesia. Mahasiswa pada dasarnya sudah mengikuti perkembangan politik di Indonesia dan Pilpres 2019 ini. Mahasiswa mengikuti perkembangannya baik secara langsung maupun tidak langsung lewat berbagai macam media. Akan tetapi kesadaran politik dan kepekaan terhadap politik masih dibidang belum terlalu tinggi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa mahasiswa yang acuh tak acuh terhadap perpolitikan. Tetapi juga ada mahasiswa yang sadar akan dan turun langsung untuk mengkritisi segala perkembangan perpolitikan di Indonesia (Crale and Vibbert, 1985; Gaunt and Ollenburger, 1995; Kriyantono, 2012)

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret menemui isu SARA yang membahas tentang agama dan etnis. Hal ini bisa dilihat baik itu di media sosial maupun media lainnya. SARA merupakan isu yang paling diperhatikan dalam menghadapi Pilpres 2019, dan di Indonesia sendiri isu yang paling kental adalah isu mengenai aliran agama. Isu ini sering digunakan sebagai pihak politikus untuk mengusung diri maupun menjatuhkan pihak lain baik secara konvensional maupun melalui media sosial. Ketika salah satu calon terikat dengan permasalahan SARA, maka pendukung mereka sedikit banyak mengalami peralihan, ada yang benar-benar menjadi pendukung setia calon, namun masyarakat awam yang menuntut kesejahteraan akan memilih calon yang memang bersih dari masalah dan dapat memerdekakan rakyat dari permasalahan yang selama ini dihadapi.

Salah satu hal yang diperbincangkan adalah dengan majunya salah satu tokoh agama menjadi bakal calon wakil presiden berikutnya. Dalam hal ini rupanya masyarakat sempat membentuk menjadi dua kubu yang masing-

masing memiliki paham yang sama mengenai salah satu calon namun parahnya. Kemudian bersikap tidak sportif. Bahkan masih banyak isu-isu SARA yang telah muncul dan hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi baik masyarakat, civitas akademika seperti mahasiswa maupun elit politik Indonesia (Geertz, 1974, 1981). Perspektif mahasiswa sebagai agen perubahan pada umumnya memberikan pandangan bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu menambahkan isu-isu yang tidak menyehatkan dan dapat membuat perpecahan masyarakat (Regeester and Larkin, 2008). Ada pendapat lain, sebenarnya isu SARA yang muncul tidak berhubungan langsung dengan calon politikus tapi orang-orang disekitarnya yang membuat berita-berita tersebut, dan peran media cukup besar menyebarkan isu-isu SARA dalam politik. Mengenai perspektif tergantung sumber daya manusianya bagaimana mereka menanggapi secara politik isu tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar mahasiswa berharap agar Pemilu ke depan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada perpecahan. Pemilu dilakukan tanpa adanya hal yang berkaitan tentang SARA yang dapat mengirim opini masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi bingung. Selain itu mahasiswa berharap tidak lagi ada *money politic* yang merugikan negara, karena mahasiswa menganggap Pemilu yang dilakukan dengan *money politic* akan menyebabkan peluang untuk melakukan korupsi sejak dini akan semakin besar.

Menyikapi banyaknya isu SARA yang muncul di Pilpres 2019, karena banyak oknum-oknum yang memprovokasi pada saat Pilpres 2019 yang memakai *hashtag* di sosial media yang tersebar dengan cepat seperti *#diasibukkerja* oleh pendukung Jokowi dan serta *#tagar 2019 ganti presiden* oleh pendukung Prabowo. Selain *#tagar* tersebut juga ada isu SARA lainnya yang bernuansa agama. Hal ini sangat disayangkan, karena sebagian masyarakat Indonesia mayoritas nya merupakan orang-orang awam yang tidak mengerti hal yang perlu diterima dengan bijak dan mana yang tidak perlu diterima. Masyarakat cenderung menerima mentah-mentah berita yang terjadi di media sosial tanpa mengetahui akar permasalahan atau pengaruh-pengaruh yang akan terjadi. Keadaan ini tidak lain karena masyarakat Indonesia memang tidak semuanya terdidik dengan baik terutama yang berada di wilayah pedalaman (Sumardiana, 2016).

Dalam upaya menanggulangi isu SARA yang ada, maka keadaan tersebut mestinya mewujudkan ide dan solusi. Salah satu hal yang penting harus dilakukan adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pengetahuan seputar pemilihan umum, legislatif lebih aktif, pencerdasan mengenai *hoax* dan menolak penyebaran isu yang tidak sehat. Anak muda dan mahasiswa juga butuh dan hal ini justru penting untuk dibina. Tentunya masyarakat awam dengan mahasiswa akan berbeda dalam pelaksanaan penyuluhan. Anak-anak muda masa sekarang memerlukan peran politik sesegera mungkin yang disampaikan oleh ahlinya agar memunculkan generasi yang melek politik.

KESIMPULAN

Isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019 yaitu isu agama, yang diketahui dari media sosial dan media lainnya. Sebagai agen perubahan, mahasiswa berpandangan bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu menanggapi isu-isu yang tidak sehat dan dapat membuat perpecahan masyarakat, namun mewujudkannya dalam ide dan solusi. Media hendaknya tidak memihak salah satu calon, serta tidak ada *money politic* dalam Pilpres 2019 yang dapat menyebabkan peluang korupsi semakin besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pemuda dan mahasiswa tentang seputar pemilihan umum, legislatif harus lebih aktif, pencerdasan mengenai *hoax* dan menolak penyebaran isu yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, S. (2013). ASPEK DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM RAYA ONLINE PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANGTAHUN 2011. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 2(2).
- Bakhri, S. (2018). RESIPROSITAS DALAM SUNAT POCI DAN MANTU POCI MASYARAKAT TEGAL. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(1).
- Cohen, Abner. 1974. *Two Dimensional Men An Essay On The Anthropology Of Power And Symbolism In Complex Society*. California. University of California Press
- Crable, Richard E and Steven L Vibbert. 1985. 'Managing Issues and Influencing Public Policy'. In Crable, R.E. *Issue Management*. Sacramento: California State University Sacramento.
- Febriana, M. (2018). Hiperrealitas "Endorse" dalam Instagram Studi Fenomenologi Tentang Dampak Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(2).
- Gaunt, Philip. and Ollenburger, Jeff. 1995. Issues management revisited: Atool that deserves another look. *Public Relations Review*, 21(3), 199-211.
- Geertz, Clifford. 1974. *Tafsir Kebudayaan*, terjemahan. Budi Susanto. Yogyakarta : Kanisius.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Harrison, Shirley. 2000. *Public Relations: an Introduction*, 2nd edn. Business Press: London.
- Kahan, Reuven and Tamar Rapoport. 1997. *The Origins of Postmodern Youth: Informal Youth Movements in a Comparative Perspective*. Berlin – New York: Walter de Gruyter & Co
- Kartono, Kartini. 1985. *Kepribadian: Siapakah Saya?*. Jakarta: CV. Rajawali
- Koentjaraningrat, 1986, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru

- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Public Relation & Crisis Management : Pendekatan Critical Public Relations Etomografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Kroeber, Alfred L. 1948, *Anthropology: Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory*. New York: Harcourt, Brace and Company.
- Regester, Michael and Judy Larkin. 2008. Risk Issues and Crisis Management in Public Relations. A Casebook of Best Practice Fourth Edition. London : Kogan Page Ltd
- Sarwono, Sarlito W. 1978. *Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Sumardiana, Benny. 2016. Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu SARA dalam Pemilihan Umum. *Pandecta*. 11(1) : 80-95.
- Sutopo, Heribertus. B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Theodorson, George A and Achilles G. Theodorson. 1979. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York, Hagerstown, San Fransisco, London: Barnes & Noble Books.
- Ulfah, Sitti Hadijah. 2010. *Evikasi Diri Mahasiswa Yang Bekerja Pada Saat Penyusunan Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.